

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN
KELOMPOK TANI LESTARI DI DESA PARDAMEAN
SIBISA KECAMATAN AJIBATA
KABUPATEN TOBA**

SKRIPSI

OLEH

MONICA PURBA

228520011



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 31/7/26

Access From (repositori.uma.ac.id)31/7/26

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAA
KELOMPOK TANI LESTARI DI DESA PARDAMEAN
SIBISA KECAMATAN AJIBATA
KABUPATEN TOBA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik

Universitas Medan Area

Oleh:

MONICA PURBA

228520011

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)31/7/26

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan
Kelompok Tani Lestari Di Desa Pardamean Sibisa
Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba

Nama : Monica Purba

NPM : 228520011

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Politik

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing


Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos. M.AP

Mengetahui



Dekan
Dr. Yurial Arief Lubis, S.Sos., M.IP



Dr. Hery Mura Muda, M.AP

Tanggal Lulus : 11 Maret 2026

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksisanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik universitas medan area, saya yang bertanda tangan
dibawah ini :

Nama : Monica Purba
Npm : 228520011
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Politik
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty- Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI LESTARI DI DESA PARDAMEAN SIBISA KECAMATAN AJIBATA KABUPATEN TOBA

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*Database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai/penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat : Medan

Pada Tanggal : 11 Maret 2026

Yang Menyatakan :



Monica Purba

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Binjai Pada tanggal 16 Agustus 2004 dari ayah J. Purba dan ibu D. Sinaga Penulis merupakan putri ketiga dari tiga bersaudara. Tahun 2022 Penulis lulus dari SMA Swasta Nusa Penida Medan dan pada tahun 2022 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Penulis melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2025.



ABSTRAK

Desa Pardamean Sibisa memiliki potensi lahan pertanian yang cukup luas sehingga memerlukan upaya pemberdayaan masyarakat petani melalui kelembagaan kelompok tani. Namun, pemberdayaan Kelompok Tani Lestari belum sepenuhnya memberikan kontribusi maksimal terhadap kesejahteraan petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan Kelompok Tani Lestari serta faktor-faktor penghambatnya di Desa Pardamean Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang meliputi pemerintah desa, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), ketua kelompok tani, dan anggota kelompok tani. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan perannya sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator, namun belum optimal. Kendala utama yang ditemukan adalah belum adanya regulasi desa khusus, keterbatasan pendampingan dan penyuluhan pertanian, serta bantuan sarana dan prasarana yang belum tepat sasaran. Penelitian menunjukkan bahwa diperlukan penguatan peran pemerintah desa agar pemberdayaan kelompok tani dapat berjalan lebih terarah, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

Kata Kunci : Peranan, Pemerintah Desa, Pemberdayaan, Kelompok Tani

ABSTRACT

The village of Pardamean Sibisa has vast agricultural land potential, requiring efforts to empower farmers through farmer group institutions. However, the empowerment of the Lestari Farmer Group has not yet fully contributed to the welfare of farmers. This study aims to determine the role of the village government in empowering the Lestari Farmers Group and the factors that hinder it in Pardamean Sibisa Village, Ajibata District, Toba Regency. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out through interviews, observations, and documentation with informants including the village government, Field Agricultural Extension Workers (PPL), farmer group leaders, and farmer group members. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the village government had performed its role as regulator, dynamizer, and facilitator, but not optimally. The main obstacles found were the absence of specific village regulations, limited agricultural assistance and extension, and aid in the form of facilities and infrastructure that did not reach the target. The study shows that it is necessary to strengthen the role of the village government so that the empowerment of farmer groups can be more focused, sustainable, and capable of improving the welfare of farmers.

Keywords: Role, Village Government, Empowerment, Farmer Groups

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah Tata Kelola Pemerintah Desa dengan judul Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Lestari Di Desa Pardamean Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba

Terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos. M.AP selaku pembimbing yang telah banyak memberikan saran. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, serta seluruh keluarga atas segala doa dan perhatiannya. Penulis menyadari bahwa tugas akhir/skripsi/tesis ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir/skripsi/tesis ini.

Penulis berharap tugas akhir/skripsi/tesis ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

Monica Purba

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DARTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	9
 II. TINJAUAN PUSTAKA	 11
2.1 Peranan	11
2.2 Pemerintah Desa.....	13
2.3 Peranan Pemerintah Desa.....	15
2.4 Pemberdayaan	18
2.5 Kelompok Tani	20
2.6 Kajian Riset Terdahulu	24
2.7 Kerangka Pemikiran	31
 III. METODOLOGI PENELITIAN.....	 33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	33
3.2.1 Lokasi Penelitian	33
3.2.2 Waktu Penelitian.....	34

3.3 Teknik Pengumpulan Data	35
3.4 Informan Penelitian	37
3.5 Teknik Analisis Data.....	39
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Hasil.....	42
4.1.1 Gambaran Desa Pardamean Sibisa	42
4.1.2 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pardamean Sibisa.....	43
4.1.3 Visi Dan Misi Desa Pardamean Sibisa.....	44
4.1.4 Keadaan Sosial.....	46
4.1.5 Kondisi Ekonomi	46
4.1.6 Gambaran Umum Kelompok Tani Lestari.....	47
4.1.7 Tujuan Kelompok Tani Lestari.....	49
4.1.8 Struktur Kepengurusan Kelompok Tani Lestari	50
4.1.9 Uraian Tugas Kepengurusan Kelompok Tani Lestari	51
4.2 Pembahasan	52
4.2.1 Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Lestari	52
4.2.2 Faktor Penghambat Pemberdayaan Kelompok Tani Lestari	73
V. KESIMPULAN DAN SARAN	76
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

1. Peneliti Terdahulu	25
2. Waktu Penelitian	34
3. Informan Penelitian.....	39
4. Penduduk Menurut Pekerjaan Tahun 2020	47
5. Anggota Kelompok Tani Lestari.....	48
6. Hasil Observasi	84



DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pemikiran.....	32
2. Struktur Tata Kerja Pemerintahan Desa	44
3. Struktur Kepengurusan Kelompok Tani Lestari.....	50
4. Sosialisasi Pemerintah Desa Dan PPL Pada Kelompok Tani Lestari	60
5. Pemberian Unit Alat Penggiling Serbaguna Kepada Kelompok Tani.....	66
6. Monitoring Pembangunan Jalan Usaha Tani.....	67
7. Pemberian Pestisida Kepada Kelompok Tani	68
8. Kantor Kepala Desa Pardamean Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba.....	96
9. Lokasi Ladang Milik Petani	96
10. Tanaman Cabai Petani.....	96
11. Lokasi Jalan Menuju Ladang Petani	97
12. Lokasi Jalan Menuju Ladang Petani	98
13. Serangan Hama Pada Tanaman Jagung.....	98
14. Wawancara Dengan Kepala Desa Pardamean Sibisa	99
15. Wawancara Dengan Sekretaris Desa Pardamean Sibisa	99
16. Wawancara Dengan Koordinator PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) ..	100
17. Wawancara Dengan Ketua Kelompok Tani Lestari	100
18. Wawancara Dengan Anggota Kelompok Tani Lestari	100

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Riset	82
2. Surat Selesai Riset.....	83
3. Lembar Hasil Observasi.....	84
4. Pedoman Wawancara	86
5. Dokumentasi Observasi	96
6. Dokumentasi Wawancara	99



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian masih berfungsi sebagai penopang utama kehidupan masyarakat di Indonesia. Sebagai negara yang bergantung pada agraris, sebagian besar warga negara Indonesia menggantungkan sumber penghidupan mereka pada sektor pertanian, dengan total rumah tangga yang terlibat dalam usaha pertanian mencapai 28. 419. 398, sementara jumlah rumah tangga petani adalah 27. 368. 975 (BPS Indonesia 2023). Oleh karena itu, keberlangsungan sektor pertanian sangat penting untuk pembangunan nasional, di mana upaya memperkuat kemampuan petani, pemberdayaan, dan peningkatan kelembagaan pertanian harus menjadi fokus untuk memastikan bahwa sektor ini terus berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan desa. Mengingat betapa krusialnya sektor ini, pemahaman mengenai hubungan dengan upaya pemberdayaan masyarakat menjadi sangat diperlukan.

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses yang berjalan terus-menerus dan terarah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan melalui peningkatan kapasitas individu maupun kelompok. UU No 6 Tahun 2014 tentang desa butir 12 mengatakan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan

masyarakat desa. Dalam proses pemberdayaan ini, pemerintah berperan sebagai pengarah, pelaksana, dan pengendali di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Peran pemerintah desa menjadi sangat penting sebagai penggerak utama dalam pembangunan dan pemberdayaan di tingkat lokal serta memiliki fungsi strategis dalam mengatur, mengelola, dan mengarahkan semua potensi yang ada di desa oleh masyarakatnya.

Pemerintah desa berfungsi sebagai pengambil keputusan dan pelaksana pembangunan yang paling dekat dengan warga, sehingga mereka bisa memahami secara langsung kebutuhan serta isu yang dihadapi masyarakat. Dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan undang-undang, pemerintah desa dapat merancang program pemberdayaan yang cocok dengan potensi lokal, meningkatkan kemampuan para petani, dan memperkuat organisasi kelompok tani agar mereka lebih mandiri dan produktif. Dengan demikian, pemerintah desa bukan hanya pelaksana kebijakan, tetapi juga agen perubahan yang berperan dalam menciptakan kemandirian dan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Peran aktif ini menjadi dasar pembentukan kelompok tani di tingkat lokal sebagai sarana pemberdayaan petani dan peningkatan ekonomi desa. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang cepat, kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas juga semakin besar. Terutama bagi masyarakat desa yang masih memiliki lahan pertanian dan tidak memiliki keterampilan lain serta tingkat pendidikan yang terbatas, mereka secara tidak langsung memenuhi kebutuhan mereka dengan memanfaatkan lahan pertanian yang tersedia. Kelompok tani merupakan solusi yang sesuai bagi masyarakat di desa, terutama yang memiliki potensi utama dari sektor pertanian.

Kelompok tani merupakan organisasi yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, dengan tujuan untuk memfasilitasi aktivitas usaha pertanian, meningkatkan pengetahuan, serta mendorong kerja sama di antara anggotanya. Melalui organisasi petani, para petani dapat berbagi informasi, mendapatkan akses terhadap bantuan alat produksi, mengikuti pelatihan teknis, dan memperkuat daya tawar mereka dalam rantai produksi dan pemasaran hasil pertanian. Selain itu, kelompok tani berfungsi sebagai alat untuk pembelajaran sosial yang memfasilitasi perubahan sikap petani ke arah praktik pertanian yang lebih modern dan berkelanjutan. Keberadaan kelompok tani merupakan alat yang sangat penting dalam usaha pemerintah desa dan daerah untuk menciptakan pemberdayaan masyarakat pertanian yang mandiri, produktif, dan sejahtera.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani bab I pasal 1 ayat 1 Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh sarana dan prasarana produksi, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, program praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani. Peran pemerintah desa dalam kelompok tani penting untuk mewujudkan tujuan pemberdayaan tersebut secara nyata di lapangan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani penumbuhan dan pengembangan kelompok tani dilakukan melalui pemberdayaan petani untuk merubah pola pikir petani agar mau meningkatkan usaha taninya dan meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya. Dalam konteks ini, pemerintah menekankan pentingnya pelatihan yang terus-menerus untuk kelompok tani sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian. Pembinaan tidak hanya diarahkan pada peningkatan keterampilan teknis dalam bertani, tetapi juga pada perubahan pola pikir petani agar lebih inovatif, mandiri, dan adaptif terhadap kemajuan teknologi serta dinamika pasar. Melalui pemberdayaan yang dilakukan secara terencana, diharapkan kelompok tani dapat menjalankan fungsinya secara maksimal sebagai tempat belajar, berkolaborasi, dan unit produksi yang efektif. Ini merupakan landasan yang signifikan untuk membangun kemandirian para petani serta memperkuat struktur lembaga pertanian di tingkat desa, sehingga dapat mendukung tercapainya ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Kecamatan Ajibata memiliki berbagai potensi pertanian, yang meliputi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim 2021–2024 ada bawang merah , cabai keriting, cabai rawit, kentang , dan tomat. Tanaman biofarmaka menurut jenis tanaman di kecamatan ajibata , 2021–2024 ada jahe dan kunyit. Buah-buahan dan sayuran tahunan menurut jenis tanaman di kecamatan ajibata, 2021–2024 ada alpukat, durian, jambu biji, mangga, dan pisang. Potensi ini dapat berfungsi sebagai salah satu pendukung ekonomi masyarakat jika dikelola dengan cara yang berkelanjutan (BPS Ajibata 2025). Secara geografis, Kecamatan Ajibata terletak di

daerah dengan iklim tropis, dan memiliki topografi yang berada pada ketinggian antara 910 hingga 1.300 meter di atas permukaan laut (BPS Ajibata 2025). Situasi ini tidak hanya berdampak pada iklim setempat, tetapi juga berfungsi untuk meningkatkan potensi pertanian. Potensi ini bisa menjadi salah satu sumber dukungan ekonomi bagi masyarakat jika dikelola dengan cara yang berkelanjutan (BPS Ajibata 2025). Apabila dikelola dengan baik melalui perencanaan yang cermat dan dukungan dari pemerintah desa serta kelompok petani, sektor pertanian ini dapat tumbuh menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat dan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah. Kecamatan Ajibata yang terletak di Kabupaten Toba mencakup area seluas 72,8 km², yang terdiri dari 10 desa. Dari seluruh area tersebut, Desa Pardamean Sibisa merupakan desa yang paling luas dengan ukuran 16 km² atau sekitar 21,98 persen dari total luas kecamatan (BPS Ajibata 2025). Dengan demikian, desa ini memainkan peranan krusial dalam susunan wilayah Kecamatan Ajibata.

Desa Pardamean Sibisa memiliki luas lahan yang memadai untuk pengelolaan di bidang pertanian, beberapa potensi pertanian yang ada di Desa Pardamean Sibisa yaitu jagung, kelapa, kopi, coklat, kemiri, aren. Potensi yang besar dan kebutuhan dalam sektor ini memerlukan pemberdayaan bagi masyarakat petani. Oleh sebab itu, pada tahun 2021 dibentuklah kelompok tani berkelanjutan di Desa Pardamean Sibisa yang terdiri dari 35 anggota. Diharapkan dengan adanya kelompok tani ini, pemerintah desa dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap sektor pertanian di desa Pardamean Sibisa. Adapun beberapa program didalam pengembangan kelompok tani ini yaitu penyaluran bantuan pemerintah (benih, pupuk subsidi, pestisida, dan alat pertanian), pendampingan, dan

penyuluhan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas usaha tani, menekan biaya produksi, serta mendukung penerapan teknologi pertanian yang lebih efisien. Bantuan ini diharapkan mampu meringankan beban petani sekaligus meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Pendampingan dilakukan secara berkelanjutan oleh penyuluh pertanian lapangan dan aparat desa untuk membimbing kelompok tani. Penyuluhan pertanian berperan sebagai sarana edukasi dan transfer pengetahuan kepada petani terkait inovasi teknologi, teknik budidaya yang tepat, pengendalian hama dan penyakit, serta strategi pemasaran hasil pertanian. Melalui pendampingan, petani diharapkan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengambil keputusan dan mengelola usaha pertanian secara mandiri dan berkelanjutan. Namun pada pra penelitian ditemukan bahwa, upaya untuk memberdayakan kelompok tani tersebut belum sepenuhnya menghasilkan kontribusi yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan ini belum memiliki kebijakan atau peraturan desa yang secara khusus mengatur arah dan mekanisme pemberdayaan kelompok tani. Akibatnya, pelaksanaan program masih bersifat umum dan belum terencana sesuai dengan kebutuhan petani.

Usaha pemerintah desa untuk mendorong dan meningkatkan keterlibatan petani masih memiliki batasan, yang terlihat dari ketiadaan penyuluhan dan pendampingan yang berkelanjutan, terutama dalam hal penanganan penyakit tanaman yang berpengaruh langsung pada hasil pertanian. Selain itu, bantuan yang diberikan oleh pemerintah desa dalam bentuk penyediaan fasilitas pertanian belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan, karena dukungan yang diberikan belum mencerminkan kebutuhan nyata para petani di lapangan. Keadaan ini mengakibatkan pemberdayaan kelompok tani belum berhasil meningkatkan

kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan petani secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah desa yang lebih efektif dan terfokus dalam mendukung keberlangsungan kelompok tani di Desa Pardamean Sibisa. Sehubungan dengan hal tersebut, masyarakat sangat mengharapkan keterlibatan aktif dari pemerintah desa dalam memaksimalkan program pemberdayaan kelompok petani. Peran tersebut diharapkan tidak terbatas pada penyediaan sarana dan prasarana, tetapi juga mencakup pendampingan, pelatihan, dan penyuluhan yang berkelanjutan, sehingga petani mampu meningkatkan kapasitas, kemandirian, serta menjadi lebih kompetitif dalam menghadapi tantangan sektor pertanian di masa yang akan datang.

Penelitian yang dilakukan oleh Muh Husnil (2025), Pemerintah Desa memiliki peran penting dalam memberdayakan kelompok tani di Desa Ogoamas 1, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala. Hasil studi mengindikasikan bahwa kontribusi pemerintah desa dalam memberdayakan kelompok tani di Desa Ogoamas 1, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala masih belum maksimal. Pemerintah telah menjalankan peran sebagai pengatur, pendorong, dan pendukung, tetapi masih ada beberapa hambatan, seperti kurangnya pemahaman mengenai kebijakan, sedikitnya jumlah penyuluh, serta rendahnya keterlibatan petani.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggreyni Raintung et al., (2021) mengenai Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan belum mencapai hasil yang maksimal. Walaupun pemerintah desa sudah membentuk Gapoktan dan memberikan berbagai pelatihan serta bantuan, peran pemerintah masih mengalami berbagai tantangan akibat kurangnya perhatian, pembinaan, bantuan yang tidak

sama. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan di Desa Pardamean Sibisa serta didukung oleh penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani masih belum optimal, baik dari aspek kebijakan, pembinaan, maupun penyediaan fasilitas. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “ *Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Lestari Di Desa Pardamean Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah dikemukakan diatas maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani lestari di Desa Pardamean Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba?
2. Apa saja faktor penghambat pemberdayaan kelompok tani lestari di Desa Pardamean Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani lestari di Desa Pardamean Sibisa.
2. Untuk mengetahui, apa saja faktor penghambat pemberdayaan kelompok tani lestari di Desa Pardamean Sibisa.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teori maupun praktis. Manfaat tersebut adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan kemampuan berpikir ilmiah dan sistematis, serta keterampilan dalam menulis yang berasal dari kajian di bidang ilmu administrasi publik, terutama yang berkaitan dengan fungsi pemerintah, khususnya pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Studi ini akan memberikan manfaat kepada pemerintah Kabupaten Toba Samosir dalam menilai kinerja Perangkat Desa dalam usaha memberdayakan kelompok tani.

2. Bagi Akademisi

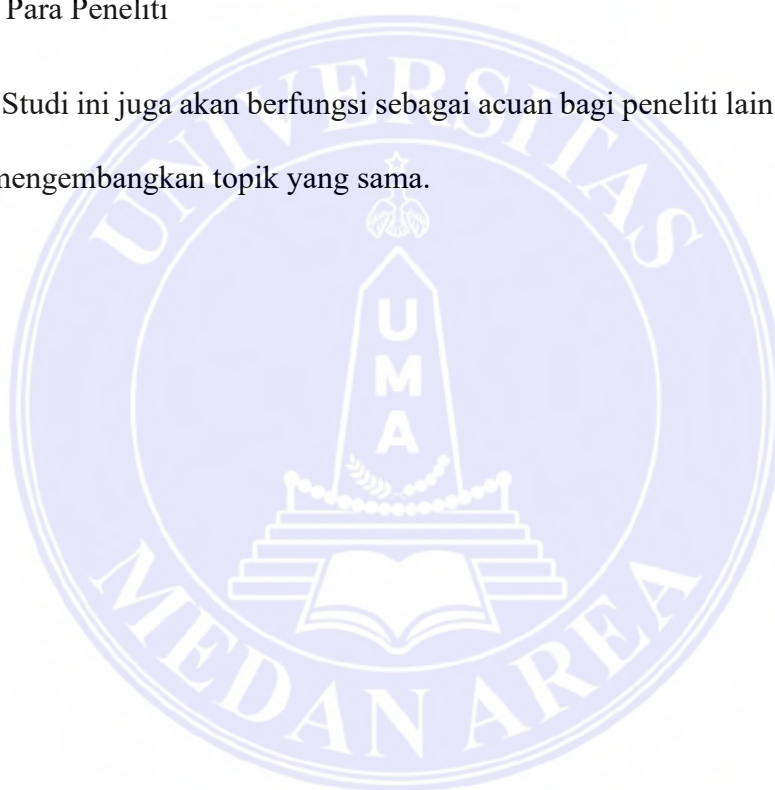
Studi ini memberikan kontribusi signifikan kepada kalangan akademisi dengan menambah sumber rujukan empiris mengenai praktik pemberdayaan kelompok tani oleh pemerintah desa, menyajikan contoh kasus yang relevan untuk analisis dan pembelajaran, memperkaya pengembangan teori pemberdayaan dan pembangunan desa, menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut, serta mendukung penguatan materi ajar dalam bidang administrasi publik dan pemberdayaan masyarakat.

3. Bagi Masyarakat

Melalui studi ini, diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat lokal dalam memahami cara untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dengan memanfaatkan potensi alam yang tersedia, serta dapat berkontribusi dalam mendukung pemerintah desa untuk mencapai peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan di Desa Pardamean Sibisa.

4. Bagi Para Peneliti

Studi ini juga akan berfungsi sebagai acuan bagi peneliti lain yang berminat untuk mengembangkan topik yang sama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peranan

Peranan dikemukakan oleh Dahlan (1999:5) bahwa peranan berasal dari kata peran. Peranan menurut Soerjono Soekanto (2012:212) adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Menurut Soekanto (2002:223) bahwa "peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya". Sebagaimana Ralph Linton yang dikutip oleh Soerjono Soekanto (2013:213) menyatakan, tidak ada peranan tanpa posisi atau posisi tanpa peranan.

Menurut Mintzeberg dalam Thoha (2012:12), ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:

1. Peran antar pribadi (*interpersonal role*), dalam peranan antar pribadi atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar
2. Peranan yang berhubungan dengan informasi (*information role*), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam mendapatkan informasi.
3. Peranan pengambilan keputusan (*decisional role*), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang dipimpinnya.

Menurut Bruce J. Cohen (1992:25) peran (*role*) memiliki beberapa jenis, yaitu:

1. Peranan Nyata (*Anacted Role*) yaitu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik Peranan (*Role Conflick*) yaitu suatu kondisi yang dialami oleh seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan.
4. Kesenjangan Peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional
5. Kegagalan Peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model Peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru dan ikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan peranannya.

Peranan merupakan aspek dinamis dari posisi seseorang di dalam masyarakat yang terlihat lewat tindakan, tanggung jawab, dan kewajiban sesuai dengan status yang dimiliki. Peranan ini meliputi bagaimana masyarakat mengharapkan seseorang bertindak, tindakan nyata yang diambil oleh individu, serta tuntutan sosial yang membentuk kerja seseorang dalam masyarakat. Dengan kata lain, peranan adalah kombinasi dari tindakan, harapan, dan tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam kehidupan sosial.

2.2 Pemerintah Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki hak/kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan tradisi dan hukum yang dihormati oleh pemerintah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat 1 mengatakan Desa atau desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada ayat 2 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayat 3 menyebutkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Maschab dalam Suhartono (2000 : 11) pengertian desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung alam. Kemudian Desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup sederhana, pada umumnya hidup dari lapangan pertanian, ikatan sosial, adat dan tradisi masih kuat, sifat jujur dan bersahaja, pendidikan relatif rendah dan sebagainya.

Pemerintahan desa adalah badan yang mengelola pemerintahan di tingkat desa yang bertanggung jawab untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Pemerintahan desa juga merupakan bagian dari pemerintahan daerah yang memiliki hak otonomi sesuai dengan peraturan yang ada. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Menurut Rahardjo (2010:169). Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di suatu desa diajukan untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat baik itu melalui penerapan suatu kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Berkaitan dengan tujuan pemerintahan, Ndraha (2008:6-7) berpendapat bahwa pemerintahan bertujuan melindungi hak-hak eksistensi (asasi) manusia, melestarikan lingkungannya, dan memenuhi kebutuhan dasarnya melalui proses interaksi 3 (tiga) peran, yaitu:

1. Meningkatkan nilai sumber daya yang ada dan menciptakan (membentuk) sumber daya baru sebagai peran subkultur Ekonomi (SKE).

2. Mengontrol SKE, memberdayakan, dan meredistribusikan nilai-nilai yang telah berhasil ditingkatkan atau dibentuk oleh SKE, melalui pelayanan kepada pelanggan oleh Sub Kultur Kekuasaan (SKK).
3. Mengontrol SKK oleh peran Sub Kultur Pelanggan (SKP). Jika tujuan tersebut tercapai, pemerintahan (*governance*) berkualifikasi baik (*good*).

Tujuan pemerintahan erat kaitannya dengan fungsi pemerintahan. Rasyid dalam Sumaryadi, (2010: 22) berpendapat bahwa pemerintahan mengembangkan 3 (tiga) fungsi hakiki, yaitu pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan (*service, empowerment, development*). Ndraha dalam Sumaryadi (2010:22) secara umum, dapat dikatakan bahwa pemerintah memiliki fungsi pelayanan, yaitu sebagai penyedia (*provider*) jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan sipil termasuk layanan birokrasi .

2.3 Peranan Pemerintah Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (1), dapat dipahami bahwa pemerintah desa memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, termasuk kelompok tani. Pasal 26 ayat (1) menegaskan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan, serta memberdayakan masyarakat desa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat bukanlah tugas tambahan, melainkan bagian dari tanggung jawab utama pemerintah desa. Dengan demikian, dalam konteks kelompok tani, pemerintah desa berkewajiban untuk hadir secara aktif dalam meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan keberdayaan para

petani melalui pembinaan, pendampingan, serta penciptaan kebijakan yang mendukung sektor pertanian. Selanjutnya, Pasal 78 ayat (1) menjelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam hal ini, kelompok tani merupakan bagian penting dari potensi ekonomi lokal desa yang harus dikembangkan secara optimal.

Pemberdayaan kelompok tani menjadi salah satu wujud nyata pelaksanaan pembangunan desa, karena melalui penguatan sektor pertanian diharapkan terjadi peningkatan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dalam kegiatan pertanian juga sejalan dengan tujuan pembangunan desa yang berorientasi jangka panjang. Dengan demikian, kedua pasal tersebut saling berkaitan dan memperkuat dasar hukum mengenai pentingnya peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani. Pemerintah desa tidak hanya berperan sebagai pelaksana administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan ekonomi lokal yang bertanggung jawab menciptakan kondisi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya kelompok tani secara mandiri dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemberdayaan kelompok tani dapat dipahami sebagai bagian integral dari pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

Ketentuan tersebut selaras dan memperkuat pandangan teoritis yang dikemukakan oleh Labolo (2010:36), yang menyatakan bahwa peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat terbagi ke dalam tiga peran utama, yaitu:

1) Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Peran ini menempatkan pemerintah desa sebagai pembuat, pelaksana, dan pengawas peraturan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar berjalan tertib, adil, dan sesuai dengan norma yang berlaku. Sebagai regulator, pemerintah desa menetapkan kebijakan dan peraturan desa yang mendukung pemberdayaan masyarakat, seperti pengelolaan sumber daya alam, pengaturan kelompok tani, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan desa. Fungsi regulasi ini juga mencakup pemberian arahan dan pedoman agar masyarakat memiliki landasan hukum dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

2. Peran Pemerintah sebagai Dinamisator

Pemerintah desa sebagai dinamisator berperan menggerakkan dan membangkitkan semangat masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Pemerintah berfungsi menumbuhkan motivasi, inovasi, serta inisiatif masyarakat agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki. Dalam konteks pemberdayaan kelompok tani, misalnya, peran ini terlihat ketika pemerintah mendorong petani untuk mengadopsi teknologi baru, meningkatkan produktivitas, serta bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai kemandirian ekonomi.

3) Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Dalam peran ini, pemerintah desa bertindak sebagai penyedia sarana, prasarana, dan dukungan teknis yang dibutuhkan masyarakat dalam proses pemberdayaan. Pemerintah membantu masyarakat mengakses sumber daya, seperti pelatihan, modal usaha, informasi, dan jaringan kerja sama dengan pihak lain (pemerintah daerah, LSM, maupun swasta). Sebagai fasilitator, pemerintah tidak hanya memberi bantuan fisik, tetapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.

2.4 Pemberdayaan

Pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari Bahasa Inggris, *power* diartikan sebagai kekuasaan atau kekuatan. Pemberdayaan menurut Theresia, (2015:91) merupakan proses kegiatan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis untuk mendorong semua potensi yang ada bertindak secara evolutif dengan keterlibatan dari semua potensi. Pemberdayaan dipahami sebagai cara untuk membagi kekuasaan secara adil, sehingga membuat orang-orang yang kurang mampu menjadi lebih memiliki kekuatan. Pemberdayaan juga membantu perubahan sosial yang memungkinkan mereka yang sebelumnya tidak bisa bersaing akhirnya bisa bersaing sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki.

Pemberdayaan Menurut Djohani (2003:43) adalah suatu proses untuk memberikan daya/ kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerfull*) sehingga terjadi keseimbangan. Menurut Parsons (1994:49), pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan

dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Jadi, memberdayakan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan martabat orang-orang yang sulit keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan. Dengan cara lain, memberdayakan berarti memberikan kemampuan dan kemandirian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang mereka punya.

Proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan ada lima penerapan pendekatan pemberdayaan menurut Suharto (1997:218-219) yaitu:

1. Pemukiman, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensimasyarakat berkembang secara optimal.
 2. Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannya.
 3. Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah.
 4. Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu peranan dan tugas-tugas kehidupannya.
 5. Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antar berbagai kelompok dalam masyarakat.
- Maka dari itu tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan kelompok lemah yang memiliki ketidak berdayaan baik karena kondisi internal maupun karena kondisi eksternal.

Tujuan pemberdayaan adalah untuk memperbaiki kemampuan, kemandirian, dan partisipasi masyarakat dalam mengelola potensi yang mereka miliki. Dalam proses pemberdayaan, diharapkan individu dan kelompok tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga bisa menjadi subjek yang berani mengambil keputusan dan mengubah kondisi demi kesejahteraan mereka sendiri. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas manusia lewat pendidikan, pelatihan, dan bimbingan agar masyarakat punya keterampilan, percaya diri, dan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber daya yang bisa membantu kehidupan mereka.

Pemberdayaan juga memiliki tujuan untuk menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi yang lebih adil. Dengan memperkuat organisasi masyarakat, seperti kelompok tani atau koperasi, pemberdayaan mendorong terbentuknya kerjasama dan solidaritas untuk menyelesaikan masalah bersama. Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan, fasilitas, dan akses informasi yang cukup. Hal ini dimaksudkan agar hasil pemberdayaan bisa dirasakan dengan jangka panjang. Akhirnya, diharapkan pemberdayaan ini dapat menciptakan masyarakat yang bisa mandiri, produktif, dan mampu bersaing dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di banyak bidang.

2.5 Kelompok Tani

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang pembinaan kelembagaan petani, Kelompok tani merupakan kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta

mengembangkan usaha anggota. Kemampuan kelompok petani sangat penting untuk pengembangan usaha pertanian. Apabila sekelompok petani dapat bekerja dengan baik, dua masalah lainnya (kurangnya penggunaan infrastruktur pertanian dan rendahnya kualitas tenaga kerja di bidang pertanian) akan dapat teratasi dengan sendirinya. Menurut Mardikanto (1996:435) pengertian kelompok tani adalah sebagai kumpulan orang-orang tani atau petani yang terdiri atas petani dewasa maupun petani taruna yang terikat secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang kontak tani.

Menurut Wahyuni (2003; 2) kelompok tani merupakan wadah komunikasi antar petani, serta wadah komunikasi antar petani dengan kelembagaan terkait dalam proses alih teknologi. Kelompok petani adalah organisasi yang mengatur para petani untuk mengembangkan usahanya. Organisasi ini berfungsi untuk memberi arahan kepada anggotanya melalui penyuluhan. Dalam hal ini, petani harus dilibatkan secara aktif dalam proses tersebut, bukannya hanya sebagai objek. Jika petani bergabung dalam lembaga yang kuat, posisi tawar mereka akan meningkat. Kemandirian kelompok tani hanya bisa terwujud jika lembaga mereka kuat. Semakin kuat lembaga kelompok tani, semakin tinggi juga tingkat kemandirian mereka. Kapasitas lembaga kelompok tani sangat menentukan bagaimana mereka berperan dalam pengembangan usaha pertanian. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kapasitas lembaga bagi kelompok tani yang masih belum mandiri. Pengembangan kapasitas lembaga kelompok tani adalah salah satu cara untuk memberdayakan petani secara bersama-sama. Tujuan utama dari pemberdayaan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para petani,

memperkuat ketahanan pangan, dan mendorong kemajuan ekonomi di bidang pertanian. Pemberdayaan petani bisa dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan penyuluhan yang menggunakan metode kelompok. Ini bertujuan agar terbentuk organisasi petani yang dapat bekerja sama dengan baik. Kemudian, untuk meningkatkan kemampuan kelompok tani, penyuluh pertanian akan melakukan pendampingan dan pembinaan. Mereka akan terus melakukan penilaian terhadap kemampuan kelompok tani, yang disesuaikan dengan perkembangan mereka.

Strategi Pengembangan Kelompok Tani berdasarkan SK Menteri Pertanian RI Nomor:273/Kpts/OT.160/4/2007, diarahkan untuk meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya, peningkatan kemampuan para anggotanya dalam mengembangkan agribisnis, penguatan kelompok tani menjadi organisasi yang kuat dan mandiri yang dicirikan antara lain:

1. Adanya pertemuan atau rapat anggota atau rapat pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan.
2. Disusunnya rencana kerja kelompok (RDK/RDKK) secara bersama dan dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama dan setiap akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi secara partisipatif.
3. Memiliki aturan atau norma yang disepakati dan ditaati bersama.
4. Memiliki pencatatan atau pengadministrasian organisasi yang rapih.
5. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan hilir.
6. Memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar.
7. Sebagai sumber serta pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para petani umumnya dan anggota kelompok tani khususnya.
8. Adanya jalinan kerjasama antara kelompok tani dengan pihak lain.

9. Saling bertukar pikiran antar anggota kelompok tani ataupun dengan yang lain.
10. Adanya pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau penyisihan hasil usaha atau kegiatan kelompok.

Adapun fungsi kelompok tani menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang pembinaan kelembagaan petani yaitu :

- a. Kelas belajar: Poktan merupakan wadah belajar mengajar bagi anggota untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi Usahatani yang mandiri melalui pemanfaatan dan akses kepada sumber informasi dan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik;
- b. Wahana kerja sama: Poktan merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama, baik di antara sesama Petani dalam Poktan dan antarpoktan maupun dengan pihak lain, sehingga diharapkan Usahatani lebih efisien dan mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan serta lebih menguntungkan; dan
- c. Unit produksi: Usahatani masing-masing anggota Poktan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas.

Ciri-ciri kelompok tani menurut Permentan Nomor 67 Tahun 2016 tentang pembinaan kelembagaan petani yaitu :

- a. Saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara sesama anggota;

- b. Mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam berusaha tani; dan
- c. Memiliki kesamaan dalam tradisi dan/atau pemukiman, kawasan/hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi dan sosial, budaya/kultur, adat istiadat, bahasa serta ekologi.

Peran kelompok tani sangat penting sebagai tempat bagi petani untuk bekerja sama dan menjalin kemitraan dengan lembaga lain. Kelompok tani juga berfungsi sebagai saluran untuk bertukar teknologi dan informasi. Di dalam kelompok, para petani bisa saling bantu dalam mengembangkan usaha pertanian mereka. Dalam konsepnya, kelompok tani beroperasi berdasarkan kesepakatan di antara anggotanya. Kegiatan yang dilakukan bisa berdasarkan jenis usaha atau bagian dari sistem pertanian, seperti pengadaan alat produksi, pemasaran, pengolahan hasil setelah panen, dan lainnya. Pilihan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tani sangat dipengaruhi oleh kesamaan minat, sumber daya yang tersedia, kondisi sosial dan ekonomi, kedekatan antar anggota, tingkat saling percaya, serta hubungan yang baik di antara para petani. Semua ini menjadi faktor penting untuk menjaga keberlangsungan kehidupan kelompok tani, di mana setiap anggota dapat merasakan rasa memiliki dan memperoleh manfaat secara maksimal sesuai dengan ukuran kelompok tani tersebut.

2.6 Kajian Riset Terdahulu

Peneliti terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan untuk menemukan inspirasi terbaru untuk penelitian selanjutnya.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Metode	Hasil	Perbedaan dan Persamaan
1	Muh Husnil (2025) Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Ogoamas 1 Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Dongggala	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Ogoamas 1 Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Dongggala belum optimal. Pemerintah telah berperan sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator, namun masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman terhadap kebijakan, minimnya tenaga penyuluh, serta rendahnya partisipasi petani. Meski demikian, bantuan berupa benih, pupuk, dan alat pertanian telah diberikan dan cukup membantu petani dalam meningkatkan produktivitas.	Perbedaan utama terletak pada lokasi desa yang diteliti. Penelitian terdahulu berfokus pada kelompok tani padi dengan masalah utama keterbatasan penyuluh dan pemahaman kebijakan dengan teori yang digunakan yaitu dinamisator, regulator dan fasilitator. Sementara penelitian yang akan dilakukan fokus pada peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani tersebut tidak menekankan pada jenis tanaman petani. Persamaannya adalah Kedua penelitian sama-sama meneliti tentang peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di tingkat desa.
2	Anggreyni Raintung, Sarah Sambiran,	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam	Penelitian Anggreyni meneliti Gapoktan dan kelompok tani

No	Nama, Tahun, Judul	Metode	Hasil	Perbedaan dan Persamaan
	Ismail Sumampow (2021) Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow		pemberdayaan kelompok tani di Desa Mobuya belum berjalan optimal. Peran sebagai Regulator Pemerintah desa telah membentuk Gapoktan dan mengikuti regulasi yang ada, namun belum menyusun aturan khusus untuk mengatur kegiatan pemberdayaan kelompok tani. Akibatnya, arah kebijakan belum berjalan efektif. Peran sebagai Dinamisator Pemerintah sudah berusaha memberikan bimbingan dan mendorong partisipasi petani, tetapi antusiasme petani rendah karena kurangnya keaktifan pemerintah dalam memberi motivasi serta ketidaktepatan bantuan yang diberikan. Peran sebagai Fasilitator Pemberian bantuan seperti benih, pupuk, dan alat pertanian belum merata dan belum sesuai kebutuhan. Peran sebagai Katalisator	secara umum di Desa Mobuya. Penelitian sekarang meneliti Kelompok Tani Lestari secara spesifik, yang berdiri pada 2021 dan memiliki 35 anggota. Persamaan antara penelitian Anggreyni Raintung dkk. (2021) dengan peneliti sekarang adalah sama-sama meneliti peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di tingkat desa. Keduanya menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah desa sebagai aktor utama dalam mendukung peningkatan kapasitas petani melalui pembinaan, bantuan, serta penguatan kelembagaan.

No	Nama, Tahun, Judul	Metode	Hasil	Perbedaan dan Persamaan
			Pemerintah belum mampu mendorong percepatan perkembangan pertanian karena minim perhatian terhadap potensi lokal, kualitas SDM petani, serta kurangnya penyediaan modal.	
3	Nurul Hasmi Appriliana, Fatmawati, Nasrul Haq (2021) Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Botomarannu Kabupaten Gowa	Kualitatif	1. Komunikasi yang efektif tanpa mengedepankan ego, menunjang proses pemberdayaan dan menghasilkan koordinasi yang baik. 2. Terdapat kesadaran tinggi akan pentingnya koordinasi di semua pihak, yang berdampak pada hasil kerja maksimal dan membantu desa mengetahui kebutuhan kelompok tani di lapangan. 3. Kesepakatan dan komitmen yang terbangun sangat menunjang program pemberdayaan dengan memprioritaskan kepentingan pertanian dan menampung keluhan warga. 4. Kontinuitas perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin hasil jangka panjang yang	Beberapa perbedaan mendasar antara lain peneliti terdahulu lebih membahas koordinasi antara pemerintah desa dan kelompok tani, di mana fokus utamanya adalah bagaimana komunikasi, kesadaran, kompetensi partisipan, serta komitmen dan kontinuitas perencanaan dapat mempengaruhi efektivitas pemberdayaan. Sedangkan peneliti sekarang Menekankan peranan pemerintah desa secara lebih luas, meliputi fungsi regulator, fasilitator, dinamisator, dalam proses pemberdayaan.

No	Nama, Tahun, Judul	Metode	Hasil	Perbedaan dan Persamaan
			positif dan maksimal. Namun demikian ada faktor penghambat utamanya yaitu kesulitan komunikasi karena jaringan internet/telepon yang belum terjangkau dan sebagian petani belum memiliki handphone, yang menyebabkan keterlambatan informasi.	Serta perbedaan lokasi penelitian.
4	Bobby Steventong (2023) Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Long Bila, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara	Kualitatif	Bahwa strategi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Long Bila yang berupa upaya membantu memfasilitasi kelompok tani berupa bantuan sebagai berikut: bantuan peralatan pertanian alat berat, (mesin traktor, mesin perontok padi, mesin pompa air irigasi dan peralatan pertanian lainnya.) dan juga berupa bantuan berupa bibit padi unggul bersubsidi, pupuk, bibit jagung dan bantuan pembangunan irigasi pengairan sawah, memberikan sosialisai atau penyuluhan, pelatihan untuk kelompok tani ada juga pendampingan langsung dari dinas	Perbedaannya terdapat pada aspek teori dan pendekatan analisisnya Penelitian terdahulu menggunakan teori strategi pemberdayaan Usman (2004) yang menekankan pada penciptaan iklim, penguatan potensi, dan perlindungan terhadap masyarakat tani. Sementara penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori peranan pemerintah desa dengan tiga indikator utama, yaitu sebagai regulator, dinamisor, fasilitator, sehingga

No	Nama, Tahun, Judul	Metode	Hasil	Perbedaan dan Persamaan
			PPL, dan berupa kebijakan desa penjualan gabah kepada pemerintah daerah (PERUSDA) semua bantuan berupa materi tersebut bersumber dari dinas terkait atau pemerintah kabupaten yang diajukan pemerintah Desa. Adapun strategi khusus yang dilakukan oleh pemerintah desa LongBila dalam upayah pemberdayaan kelompok tani iyalah melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam mengelola gabah padi petani progarm tersebut sangat membantu petani agar bisa mewujudkan keberdayan dan kesejahteraan petani di Desa Long Bila.	analisisnya lebih menekankan pada fungsi dan peran kelembagaan pemerintah desa dalam proses pemberdayaan. Lokasi penelitian pun berbeda.
5	Sayid Basrah Lubis (2020) Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Petani Desa Ujung Serdang Kecamatan Tanjung Morawa	Kualitatif deskriptif	Peran Pemerintah desa Ujung Serdang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dalam pemberdayaan petani memiliki peranan yang sangat baik dalam peningkatan pertanian di desa yaitu sebagai Fasilitator,	Penelitian di Tanjung Morawa berfokus dengan penekanan pada peran pemerintah desa sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing untuk meningkatkan hasil panen padi, jagung, dan ubi.

No	Nama, Tahun, Judul	Metode	Hasil	Perbedaan dan Persamaan
	Kabupaten Deli Serdang		Pemberian informasi pada kelompok tani, Memotivasi Kelompok tani, Pengawas dan pelaksana Dalam Distribusi Bantuan Pupuk, Pembimbing dan Pengarah untuk Petani. Namun dalam setiap pelaksanaan pemberdayaan akan ada faktor yang membuat pemberdayaan berjalan dengan baik maupun tidak.	Sementara penelitian yang akan dilakukan menekankan peran pemerintah desa: Regulator, Dinamisator, Fasilitator. Sedangkan persamaannya yaitu Penelitian ini menempatkan pemerintah desa sebagai aktor utama dalam meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan petani melalui pelatihan, penyuluhan, dan penyediaan fasilitas pertanian.
6	Herli Tumanggor (2022) Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Sionom Hudon Tonga Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan	Kualitatif	Bahwa peran kepala desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Sionom Hudon Tonga belum berjalan dengan baik karena adanya berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan kelompok tani yaitu Kualitas sumber manusia rendah, sarana parsarana	Perbedaan mendasar pada lokasi penelitian dan yang paling signifikan adalah kerangka teori/indikator peran yang digunakan. Penelitian yg akan dilakukan menggunakan indikator Peran Pemerintah Desa yang meliputi Regulator, Dinamisator, Fasilitator. sedangkan jurnal tersebut

No	Nama, Tahun, Judul	Metode	Hasil	Perbedaan dan Persamaan
			pertanian yang belum memadai, sosialisasi dan bimbingan dari instansi dinas pertanian belum dilaksanakan pada kelompok tani, terbatasnya modal untuk mengembangkan usaha para petani.	menggunakan teori peran dari Suhardono (1994:15) dengan indikator Organisator, Fasilitator, dan Inovator. Kedua penelitian memiliki persamaan fundamental, yaitu menganalisis Peran Pemerintah Desa/Kepala Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani.

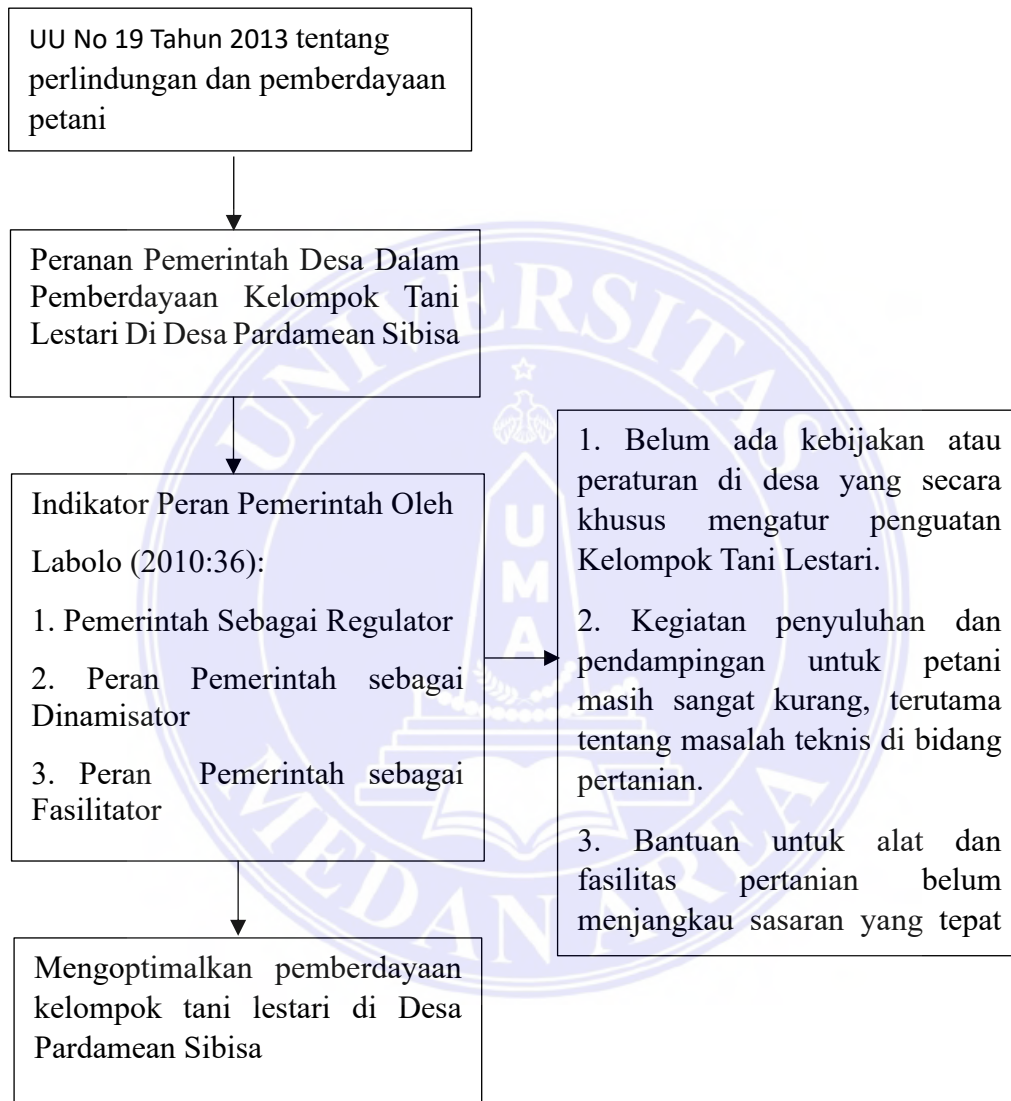
Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu struktur yang digunakan untuk merangkai dan memahami fenomena, konsep, atau masalah tertentu. Ini berfungsi sebagai panduan untuk menganalisis fenomena, serta membantu menemukan dan menghubungkan konsep-konsep yang berhubungan. Kerangka pemikiran ini adalah cara untuk melihat dan memahami suatu masalah atau fenomena dari satu sudut pandang tertentu.. Kerangka berpikir ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran Pemerintah Desa dalam memberdayakan kelompok tani yang berkelanjutan di Desa Pardamean Sibisa. Melalui kerangka pemikiran ini, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pemberdayaan kelompok tani, seperti kebijakan desa, bentuk pendampingan, penyediaan sarana dan prasarana, serta partisipasi masyarakat. Dengan demikian, kerangka pemikiran

ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis dan terarah dalam menganalisis peran Pemerintah Desa terhadap peningkatan kapasitas dan kemandirian kelompok tani secara berkelanjutan.

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan pengelompokan atau klasifikasi suatu penelitian yang didasarkan pada pendekatan, tujuan, metode, dan sifat data yang digunakan untuk mencapai sasaran penelitian. Jenis penelitian mendukung peneliti dalam memilih metode yang paling efektif untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data, sehingga hasil penelitian dapat memberikan jawaban yang akurat terhadap rumusan masalah. Studi ini menerapkan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, (2007:15) metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa informasi tertulis dan lisan dari seseorang dan perilaku yang dapat diamati. Fokus dari penelitian kualitatif ini adalah peran pemerintah dalam memberdayakan kelompok tani lestari di Desa Pardamean Sibisa.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Menurut Sugiono (2013:399) Lokasi penelitian merupakan tempat dimana situasi sosial akan diteliti. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan. Kabupaten Ajibata. Toba. Peneliti memilih lokasi tersebut karena tertarik dengan masalah yang ada di Desa Pardamean Sibisa terkait peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani berkelanjutan yang masih belum berjalan dengan optimal.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian merujuk pada jangka waktu yang digunakan oleh peneliti untuk melaksanakan semua aktivitas penelitian, mulai dari tahap persiapan hingga penyusunan laporan akhir. Waktu penelitian meliputi tahapan penyusunan proposal, seminar proposal, perbaikan proposal, pelaksanaan penelitian, seminar hasil penelitian, revisi skripsi, dan sidang skripsi. Penjadwalan penelitian bertujuan agar proses penelitian berlangsung dengan terarah, terencana, dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Tabel 2. Waktu Penelitian

No	Uraian kegiatan	Okt 2025	Nov 2025	Des 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026
1	Penyusunan proposal						
2	Seminar proposal						
3	Perbaikan proposal						
4	Pelaksanaan penelitian						
5	Seminar hasil						
6	Revisi skripsi						
7	Sidang meja hijau						

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025

3.3 Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai oleh peneliti untuk mendapatkan informasi atau data yang sesuai dan dapat dipercaya agar bisa menjawab pertanyaan dalam penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena seberapa baik data yang didapatkan akan berpengaruh pada hasil analisis dan kesimpulan yang diambil. Teknik pengumpulan data bisa dilakukan dengan berbagai metode, tergantung pada jenis penelitian, tujuan yang ingin dicapai, dan jenis data yang diperlukan. Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah cara mengumpulkan informasi dengan melihat atau pengamatan langsung ke lapang. Menurut Bungin (2012), observasi memiliki dua tipe yaitu observasi tidak langsung dan observasi partisipan. Observasi tidak langsung adalah metode di mana peneliti tidak terlibat langsung dengan masyarakat. Sementara itu, observasi partisipan adalah ketika peneliti ikut serta dalam aktivitas kelompok yang diteliti. Observasi partisipan dilakukan dengan ikut terlibat langsung dalam beberapa kegiatan kelompok tani, seperti aktivitas pengolahan lahan, penanaman, dan pertemuan kelompok, sehingga peneliti dapat memahami secara nyata proses pemberdayaan yang berlangsung serta interaksi antara pemerintah desa, PPL, dan anggota kelompok tani. Melalui keterlibatan ini, peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bentuk pendampingan, pola kerja kelompok, serta partisipasi petani dalam setiap kegiatan. Sementara itu, observasi tidak langsung dilakukan dengan mengamati kondisi lingkungan pertanian, ketersediaan sarana dan prasarana, serta aktivitas

pemerintah desa dalam mendukung kegiatan kelompok tani tanpa terlibat secara langsung.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan. Menurut Bungin (2012), ada dua tipe wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara mendalam. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan mengikuti panduan wawancara, di mana pertanyaan yang diajukan kepada responden telah disiapkan dengan teratur. Jawaban diberikan biasanya sudah ditentukan dari pilihan yang sudah ada. Di sisi lain, wawancara mendalam adalah cara mendapatkan informasi dengan bertemu langsung dengan informan agar data yang diperoleh bisa lebih lengkap dan detail. Dalam penelitian ini, tipe wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur dan mendalam.

Wawancara mendalam dilakukan kepada informan dengan tujuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi mungkin agar peneliti mendapatkan data yang lengkap mungkin. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan pedoman berupa pertanyaan yang sudah disiapkan untuk membantu proses wawancara. Teknik untuk mengumpulkan data atau informasi dalam wawancara dilakukan secara langsung untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan mendalam. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan kunci, yaitu Kepala Desa Pardamean Sibisa, Sekretaris Desa, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Ketua Kelompok Tani Lestari, dan anggota kelompok tani. Wawancara yang diperoleh

akan menunjukkan hasil yang didapat dalam pemberdayaan kelompok tani Lestari yang dilakukan oleh pemerintah desa Pardamean Sibisa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu alat untuk melengkapi data yang bertujuan mendukung informasi yang diperoleh dari lapangan. Dengan dokumentasi, data yang didapatkan menjadi lebih tepat dan bisa dipercaya. Dalam penelitian ini, dokumentasi meliputi struktur organisasi, data kelompok tani, foto, dan lainnya. Dokumentasi diperoleh melalui pengumpulan data berupa foto kegiatan wawancara, aktivitas kelompok tani, kantor desa, struktur organisasi pemerintah desa, struktur kepengurusan kelompok tani, serta dokumen pendukung lainnya. Dokumentasi ini memperkuat data hasil observasi dan wawancara terkait pelaksanaan peran pemerintah desa pardamean sibisa dalam pemberdayaan kelompok tani lestari, serta memperlihatkan kondisi nyata di lapangan.

3.4 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi atau data dalam sebuah penelitian, wawancara, atau kegiatan pengumpulan data lainnya. Mereka biasanya punya pengetahuan, pengalaman, atau terlibat langsung dengan topik yang diteliti. Informan berperan sebagai sumber utama informasi yang membantu peneliti memahami konteks, sudut pandang, dan fenomena yang sedang dikaji.

Menurut Bagong Suyatno, (2005:172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu :

1. Informan kunci adalah orang-orang yang memiliki informasi penting yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, informan kunci adalah Kepala

Desa Pardamean Sibisa. Kepala Desa Pardamean Sibisa dipilih karena dia memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan desa dan paham betul mengenai kebijakan, perencanaan, serta pelaksanaan program pemberdayaan pertanian.

2. Informan utama adalah orang-orang yang ikut serta langsung dalam interaksi sosial yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, informan utama adalah Sekretaris Desa dan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan). Sekretaris Desa dipilih karena terlibat langsung dalam aspek administratif dan teknis dari program yang sedang diteliti. Sekretaris Desa tahu cara kerja administrasi dan paham betul bagaimana program dibuat dan diorganisir di desa. Di sisi lain, PPL sering berinteraksi dengan para petani, jadi mereka tahu keadaan sebenarnya yang dialami kelompok tani, masalah yang dihadapi, dan bagaimana keterampilan serta kemandirian petani berubah setelah program pemberdayaan. Selain itu, PPL juga bertindak sebagai penghubung antara pemerintah desa, dinas pertanian, dan kelompok tani.

3. Informan tambahan adalah orang-orang yang bisa memberikan informasi meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam hubungan sosial yang sedang diteliti. Untuk penelitian ini, informan tambahan terdiri dari Ketua Kelompok Tani Lestari dan anggota kelompok tani Lestari. Ketua kelompok tani memiliki pemahaman tentang kondisi dalam kelompok, interaksi antar anggotanya, dan bagaimana masyarakat merespons program pemberdayaan dari pemerintah desa. Di sisi lain, anggota kelompok tani berbagi pengalaman pribadi mengenai keuntungan, masalah, dan perubahan yang mereka alami selama mengikuti program pemberdayaan.

Tabel 3 Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jenis Informan	Keterangan
1	Maringan Sirait	Informan Kunci	Kepala Desa
2	Herti Sirait	Informan Utama	Sekretaris Desa
3	Welvin Sitohang	Informan Utama	PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan)
4	Tumpal Panjaitan	Informan Tambahan	Ketua Kelompok Tani Lestari
5	Timbul Hutaeruk	Informan Tambahan	Anggota Kelompok Tani Lestari

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2026

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara-cara yang digunakan untuk mengolah, memahami, dan menjelaskan data yang didapat selama penelitian, sehingga bisa menjawab pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya. Menurut Bagong Suyatno, (2005:70) Pengambilan analisa data dari hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif, yaitu berusaha menganalisa dengan menjelaskan secara rinci dan apa adanya mengenai objek yang diteliti. Data dan informasi yang didapat dari objek penelitian dipilih dan dibagi menggunakan teori yang tepat sebagai dasar dalam penelitian untuk mendapatkan hasil yang tepat.

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan mengatur data yang didapat dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya secara sistematis, sehingga mudah dimengerti dan bisa disampaikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif. Analisis model interaktif memudahkan untuk melakukan analisis data secara kualitatif dengan cara yang interaktif dan terus menerus hingga selesai. Proses untuk menganalisis data ini dilakukan melalui beberapa langkah. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi Data

Tahap dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk mengurangi, memilih, dan memilah data yang sesuai dengan fokus penelitian. Data yang tidak penting, terlalu banyak, atau berulang akan dihilangkan sehingga hanya informasi yang esensial dan bermakna yang tersisa. Dalam penelitian ini, peneliti lebih menekankan pada Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Lestari di Desa Pardamean Sibisa. Reduksi data dilakukan setelah seluruh data penelitian terkumpul melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dengan cara memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang tidak berkaitan, berulang, atau kurang mendukung tujuan penelitian dieliminasi. Dalam penelitian ini, reduksi data difokuskan pada informasi yang berkaitan dengan peran Pemerintah Desa Pardamean Sibisa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Lestari di Desa Pardamean Sibisa, meliputi peran sebagai fasilitator, regulator, dan dinamisor.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah langkah untuk menyusun dan mengatur data yang telah disederhanakan ke dalam format yang lebih jelas dan mudah dipahami. Penyajian data bertujuan untuk membantu peneliti melihat hubungan antar data, menemukan pola, dan menarik kesimpulan dengan lebih jelas. Penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif yang sistematis dan terstruktur. Data disajikan berdasarkan tema-tema penelitian agar mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian data ini bertujuan untuk

memberikan gambaran yang jelas mengenai bentuk peran pemerintah desa Pardamean Sibisa, program pemberdayaan yang dilaksanakan, serta kendala dan dampak yang dirasakan oleh kelompok tani lestari.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap terakhir dalam analisis data di mana peneliti membuat pemahaman atau keputusan berdasarkan data yang telah disederhanakan dan disajikan. Di sini, peneliti menjawab pertanyaan penelitian, menghubungkan temuan dengan teori yang ada, dan menjelaskan makna atau dampak dari data yang diperoleh. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan seluruh data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pada tahap ini, peneliti merumuskan temuan-temuan utama mengenai peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan Kelompok Tani Lestari di Desa Pardamean Sibisa, serta mengaitkannya dengan teori dan hasil penelitian terdahulu. Kesimpulan yang diperoleh digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas program pemberdayaan yang telah dilaksanakan dalam pemberdayaan kelompok tani lestari di desa Pardamean Sibisa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Peranan pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas kelompok petani.

Pemerintah Desa Pardamean Sibisa telah melaksanakan perannya dalam mengembangkan kelompok tani dengan berfungsi sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Namun, pelaksanaannya belum dilakukan dengan efisien. Sebagai pihak regulator, pemerintah desa belum mengeluarkan kebijakan atau peraturan tertulis yang secara khusus mengatur tentang kelompok tani. Sebagai dinamisator, pemerintah desa telah berusaha memberikan motivasi, petunjuk, dan melakukan koordinasi dengan PPL. Namun, kegiatan tersebut masih terfokus pada sosialisasi dan belum disertai dengan pendampingan teknis yang berkelanjutan. Sementara itu, dalam peran sebagai fasilitator, pemerintah desa telah memberikan berbagai bantuan berupa sarana dan prasarana pertanian serta menghubungkan kelompok tani dengan pihak-pihak yang relevan. Namun, bantuan yang diberikan masih tergolong terbatas, belum sepenuhnya mengenai sasaran yang tepat, dan belum mampu secara signifikan meningkatkan produktivitas petani.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pemberdayaan kelompok petani.

Pemberdayaan kelompok tani di Desa Pardamean Sibisa mengalami berbagai tantangan, seperti tidak adanya peraturan desa yang mengikat, terbatasnya peran pemerintah desa dalam memberikan pendampingan teknis, serta sedikitnya jumlah dan intensitas kerja Penyuluh Pertanian

Lapangan (PPL). Selain itu, dukungan yang terbatas dalam sarana dan prasarana pertanian, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, ketidakcocokan bantuan dengan keadaan lahan, kurangnya pemetaan kebutuhan petani, serta rendahnya frekuensi pendampingan dan pemantauan aktivitas kelompok tani juga menghalangi efektivitas pemberdayaan. Berbagai faktor tersebut mengakibatkan bahwa program pemberdayaan belum sepenuhnya berhasil dalam meningkatkan kapasitas, kemandirian, serta kesejahteraan kelompok tani secara berkelanjutan.

5.2 Saran

1. Diharapkan pemerintah desa dapat merancang dan menetapkan kebijakan atau peraturan desa yang secara khusus mengatur keberadaan serta aktivitas kelompok tani. Regulasi itu diperlukan sebagai panduan dan dasar hukum agar aktivitas kelompok tani dapat berlangsung dengan lebih terencana, terorganisir, dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah desa harus memperkuat perannya tidak hanya sebagai penggerak motivasi, tetapi juga sebagai penggerak aktif melalui pendampingan yang lebih mendalam serta peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).
2. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) diharapkan dapat meningkatkan frekuensi pendampingan dan penyuluhan teknis kepada kelompok tani secara teratur dan berkesinambungan. Pemetaan kebutuhan para petani berdasarkan kondisi tanah, bentuk tanah, dan jenis hasil pertanian harus dilakukan dengan lebih mendetail agar arahan serta saran teknis yang diberikan dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan di lapangan. Kondisi di

lapangan menunjukkan adanya keterbatasan jumlah tenaga penyuluh, di mana hanya terdapat dua orang PPL yang harus menangani seluruh desa yang ada di Kecamatan Ajibata. Hal ini menyebabkan jangkauan pendampingan menjadi kurang optimal, karena setiap penyuluh harus membagi waktu dan tenaga untuk melayani banyak kelompok tani di wilayah yang cukup luas. Akibatnya, intensitas kunjungan dan kualitas pendampingan yang diberikan belum dapat maksimal. Selain itu, diperlukan bantuan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan jumlah tenaga penyuluh atau mengurangi beban kerja PPL agar peran pendampingan dapat berjalan dengan lebih baik.

3. Anggota kelompok tani diharapkan senantiasa meningkatkan keikutsertaan dan persatuan di antara mereka dalam setiap aktivitas kelompok, baik itu dalam pertemuan, pengelolaan organisasi, maupun penggunaan bantuan yang diterima. Kemandirian yang sudah ada harus dijaga dan diperkuat dengan meningkatkan kerja sama, keterbukaan, serta kesadaran anggota tentang pentingnya pengelolaan kelompok yang berkelanjutan.
4. Pemerintah daerah diharapkan lebih fokus pada pemberdayaan kelompok tani dengan memberikan dukungan anggaran, meningkatkan kualitas dan ketepatan bantuan sarana serta prasarana pertanian, serta memperkuat sistem pendampingan di tingkat desa. Kerjasama yang lebih efektif antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan PPL sangat penting agar program pemberdayaan kelompok tani dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan hasil yang nyata untuk meningkatkan kesejahteraan para petani.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bagong, S. (2005). *Metode penelitian sosial: Berbagai alternatif pendekatan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Bungin, B. (2012). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Cohen, B. J. (1992). *Sosiologi: Suatu pengantar (Terj.)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djohani, R. (2003). *Pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Hermanto. (2011). *Pemberdayaan kelompok tani dan peningkatan kesejahteraan petani*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kartasapoetra, G. (1994). *Teknologi penyuluhan pertanian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Labolo, M. (2010). *Memahami ilmu pemerintahan: Suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardikanto, T. (2017). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Muhammad. (2012). *Manajemen kelembagaan pertanian*. Malang: UMM Press.
- Nasrul. (2012). *Pemberdayaan petani menuju kemandirian*. Padang: Universitas Andalas Press.
- Ndraha, T. (2008). *Kybernology: Ilmu pemerintahan baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Parsons, R. (1994). *Empowerment: A developmental perspective*. New York: Routledge.
- Prasetyono, D. (2019). *Penguatan kapasitas kelembagaan kelompok tani*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Rasyid, M. (1999). *Fungsi dan peran pemerintahan daerah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, k. d. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, I. N. (2010). *Pemerintahan daerah dan otonomi daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syamsu. (2007). *Kelembagaan pertanian dan penguatan kapasitas petani*. Bogor: IPB Press.
- Wahyuni, S. (2003). *Peran kelompok tani dalam pengembangan usaha tani*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Wulan Sari, D. (2009). *Peran sosial dan dinamika masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.

JURNAL & SKRIPSI

Basrah Lubis, S. (2020). Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan petani di Desa Ujung Serdang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. *Skripsi. Universitas Sumatera Utara*.

<http://repository.uinsu.ac.id/13604/1/SKRIPSI%20SAID%282%29.pdf>

Hasmi Appriliana, N. F. (2021). Koordinasi pemerintah desa dalam upaya pemberdayaan kelompok tani di Desa Botomarannu Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 45–56.

<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3882>

Husnil, M. (2025). Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Ogoamas 1 Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala . *Skripsi. Universitas Tadulako*.

https://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/5194/1/Muh.%20Husnil_215120038_Ekonomi%20Syariah.pdf

Nurjannah, A., & Revida, E. (2024). Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal SAJJANA: Public Administration Review*, 2(1), 1–10.

<https://talenta.usu.ac.id/sajjana/article/view/17321/7594>

Raintung, A. S. (2021). Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Mobuya. *Journal of Government Studies*, 5(1), 12–22.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/35369/33100>

Steventong, B. (2023). Strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Long Bila, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara . *Skripsi. Universitas Borneo Tarakan*.

Tumanggor, H. (2022). Peran kepala desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Sionom Hudon Tonga Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan . *Skripsi. Universitas Medan Area*.

https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/18002/2/178510004_Herli%20Tumanggor_Fulltext.pdf

PERATURAN / UNDANG-UNDANG

Kementerian Pertanian RI. (2013). *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani*.

<https://peraturan.bpk.go.id/Download/152964/Permentan%20Nomor%2082%20Tahun%202013.pdf>

Kementerian Pertanian RI. (2016). *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani*.

<https://peraturan.bpk.go.id/Download/153490/Permentan%20Nomor%2067%20Tahun%202016.pdf>

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

<https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2015/06/PP-NOMOR-43-TAHUN-2014-PERATURAN-PELAKSANAAN-UNDANG-UNDANG-NOMOR-6-TAHUN-2014-TENTANG-DESA.pdf>

Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38893/uu-no-19-tahun-2013>

SUMBER LAIN

Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik pertanian Indonesia 2023*. Jakarta: BPS RI.

<https://sensus.bps.go.id/main/index/st2023>

Badan Pusat Statistik Kecamatan Ajibata. (2025). *Kecamatan Ajibata dalam Angka 2025*. Toba: BPS Kabupaten Toba.

<https://tobakab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/83d18d3721d8fb370d74969f/kecamatan-ajibata-dalam-angka-2025.html>

LAMPIRAN

Lampiran I Surat Pengantar Riset



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 3829FIS.0/01.10/XII/2025
Lampiran. : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset

Medan, 09 Desember 2025

Kepada Yth.
Kepala Desa Pardamean Sibisa
Di Tempat

Dengan hormat,

Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

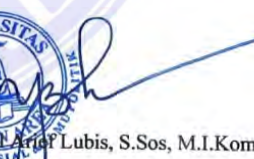
Nama : Monica Purba
NIM : 228520011
Program Studi : Administrasi Publik

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Kantor Kepala Desa Pardamean Sibisa untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

“ Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Lestari Di Desa Pardamean Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba ”

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. Fumi Arief Lubis, S.Sos, M.I.Kom

Tembusan:
1. Ka. Prodi Administrasi Publik
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip

Lampiran II Surat Selesai Riset



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
KECAMATAN AJIBATA
DESA PARDAMEAN SIBISA

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 04 / KDPS / I / 2026

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARINGAN SIRAIT
Jabatan : Kepala Desa Pardamean Sibisa
Instansi : Kantor Kepala Desa Pardamean Sibisa

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Monica Purba
NIM : 228520011
Program Studi : Administrasi Publik
Perguruan Tinggi : Universitas Medan Area (UMA)

Telah melaksanakan kegiatan riset/penelitian di Kantor Kepala Desa Pardamean Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

" Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Lestari Di Desa Pardamean Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba "

Demikian surat keterangan pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pardamean Sibisa, 8 Januari 2026

Kepala Desa Pardamean Sibisa



Lampiran III Hasil Observasi

Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Lestari Di Desa Pardamean Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba

1. Identitas Observasi

a. Lembaga yang diamati:

1. Pemerintah Desa Pardamean Sibisa

2. Kelompok Tani Lestari

b. Lokasi Penelitian: Desa Padamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba

2. Aspek -aspek yang diamati

a. Meninjau lokasi penelitian dan mengamati keadaan sekitar lokasi di desa Pardamean Sibisa

b. Mengamati kegiatan masyarakat petani yang ada di desa Pardamean Sibisa

c. Program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pardamean Sibisa

3. Lembar Observasi

Tabel 6. Hasil Observasi

No	Uraian	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Struktur tata kelola pemerintahan desa	✓		Struktur tata Kelola pemerintahan desa tertera di kantor kepala desa dengan bidang masing-masing.
2	Visi dan misi desa pardamean sibisa	✓		Visi dan misi tertera jelas di kantor kepala desa yang merupakan Gambaran atau tujuan yang akan dicapai.
3	Kegiatan anggota kelompok tani lestari disektor pertanian	✓		Keseharian anggota kelompok tani yaitu pergi ke ladang mereka menanam berbagai jenis tanaman

No	Uraian	Ada	Tidak	Keterangan
				yang kemudian mereka rawat dengan memberikan pupuk dan pestisida. Saat musim panen telah tiba mereka memanen hasil pertanian tersebut dan kemudian dijual untuk kebutuhan sehari-hari.
4	Sarana dan prasarana pertanian	✓		Sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah kepada kelompok tani lestari memang sudah ada baik itu pupuk, pestida, bibit, mulsa, dan handtraktor, serta ada alat penggiling. Namun jumlahnya masih terbatas hingga belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh anggota kelompok tani lestari.
5	Program pemberdayaan kelompok tani lestari	✓		Program yang telah dilakukan pemerintah desa seperti adanya bantuan sarana dan prasarana, pelatihan, penyuluhan, dan memotivasi para anggota kelompok tani. Namun program-program tersebut masih memiliki berbagai keterbatasan baik itu dari jumlah maupun kualitasnya.

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025

Lampiran IV Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Lestari Di Desa Pardamean Sibisa Kecamatan Ajibata Kabpaten Toba

Identitas Responden (Informan Kunci)

Nama :

Jabatan :

Jenis kelamin :

Pekerjaan :

Regulator dalam penelitian ini adalah peran pemerintah desa sebagai pihak yang membuat, menetapkan, menerapkan, dan mengawasi kebijakan serta aturan desa yang terkait dengan pemberdayaan kelompok tani. Peran pemerintah desa adalah memberi arah, pedoman, dan kepastian hukum agar kegiatan kelompok tani berjalan dengan tertib, terencana, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1. Apakah pemerintah desa memiliki aturan atau keputusan tertentu yang berkaitan dengan pengembangan kelompok tani yang berkelanjutan?
2. Bagaimana aturan atau kebijakan desa yang mengatur penguatan kelompok tani di Desa Pardamean Sibisa?
3. Apa tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam menjalankan perannya sebagai pengawas dalam mengembangkan kelompok tani?

Dinamisator dalam penelitian ini adalah peran pemerintah desa sebagai motor penggerak dan penjamin partisipasi masyarakat, terutama kelompok tani, dalam proses pemberdayaan. Peran dinamisator adalah menggerakkan pemerintah desa

untuk membangkitkan semangat, kesadaran, dan niat petani untuk ikut serta dalam kegiatan kelompok tani, penyuluhan, dan pelatihan pertanian.

1. Bagaimana pemerintah desa mempromosikan partisipasi petani untuk berpartisipasi aktif dalam kelompok tani?
2. Beragam bentuk insentif apa saja yang diberikan oleh pemerintah desa kepada kelompok tani agar mereka tetap aktif dan bisa berkembang terus?
3. Seperti apa peran pemerintah desa dalam mendorong para petani untuk mengikuti penyuluhan atau pelatihan di bidang pertanian ?
4. Apa saja faktor yang memengaruhi seberapa aktif para petani dalam mengikuti kegiatan kelompok tani?

Fasilitator dalam penelitian ini adalah pemerintah desa, yang bertindak sebagai pihak yang menyalurkan dan menghubungkan kebutuhan kelompok tani dalam upaya pemberdayaan. Peran fasilitator adalah menjadikan pemerintah desa sebagai penyedia sarana dan prasarana pertanian, bantuan, pelatihan, penyuluhan, serta bantuan teknis. Fasilitator juga membantu menjalin kerja sama dengan instansi terkait seperti dinas pertanian dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

1. Bentuk-bentuk fasilitas atau bantuan apa saja yang diberikan oleh pemerintah desa kepada kelompok tani?
2. Bagaimana proses pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian kepada kelompok tani?
3. Seberapa jauh pemerintah desa mendukung kerja sama kelompok tani dengan pihak lain, seperti dinas pertanian atau petugas penyuluh pertanian?

4. Bagaimana pemerintah desa membantu kebutuhan para petani dalam hal pelatihan dan bimbingan?
5. Apa tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam menjalankan peran sebagai fasilitator pengembangan kelompok tani?



Identitas Responden (Informan Utama)

Nama :

Jabatan :

Jenis kelamin :

Pekerjaan :

Regulator dalam penelitian ini adalah peran pemerintah desa sebagai pihak yang membuat, menetapkan, menerapkan, dan mengawasi kebijakan serta aturan desa yang terkait dengan pemberdayaan kelompok tani. Peran pemerintah desa adalah memberi arah, pedoman, dan kepastian hukum agar kegiatan kelompok tani berjalan dengan tertib, terencana, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1. Apakah pemerintah desa memiliki aturan atau keputusan tertentu yang berkaitan dengan pengembangan kelompok tani yang berkelanjutan?
2. Bagaimana aturan atau kebijakan desa yang mengatur penguatan kelompok tani di Desa Pardamean Sibisa?
3. Apa tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam menjalankan perannya sebagai pengawas dalam mengembangkan kelompok tani?

Dinamisor dalam penelitian ini adalah peran pemerintah desa sebagai motor penggerak dan penjamin partisipasi masyarakat, terutama kelompok tani, dalam proses pemberdayaan. Peran dinamisor adalah menggerakkan pemerintah desa untuk membangkitkan semangat, kesadaran, dan niat petani untuk ikut serta dalam kegiatan kelompok tani, penyuluhan, dan pelatihan pertanian.

1. Bagaimana pemerintah desa mempromosikan partisipasi petani untuk berpartisipasi aktif dalam kelompok tani?

2. Beragam bentuk insentif apa saja yang diberikan oleh pemerintah desa kepada kelompok tani agar mereka tetap aktif dan bisa berkembang terus?
3. Seperti apa peran pemerintah desa dalam mendorong para petani untuk mengikuti penyuluhan atau pelatihan di bidang pertanian ?
4. Apa saja faktor yang memengaruhi seberapa aktif para petani dalam mengikuti kegiatan kelompok tani?

Fasilitator dalam penelitian ini adalah pemerintah desa, yang bertindak sebagai pihak yang menyalurkan dan menghubungkan kebutuhan kelompok tani dalam upaya pemberdayaan. Peran fasilitator adalah menjadikan pemerintah desa sebagai penyedia sarana dan prasarana pertanian, bantuan, pelatihan, penyuluhan, serta bantuan teknis. Fasilitator juga membantu menjalin kerja sama dengan instansi terkait seperti dinas pertanian dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

1. Bentuk-bentuk fasilitas atau bantuan apa saja yang diberikan oleh pemerintah desa kepada kelompok tani?
2. Bagaimana proses pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian kepada kelompok tani?
3. Seberapa jauh pemerintah desa mendukung kerja sama kelompok tani dengan pihak lain, seperti dinas pertanian atau petugas penyuluh pertanian?
4. Bagaimana pemerintah desa membantu kebutuhan para petani dalam hal pelatihan dan bimbingan?
5. Apa tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam menjalankan peran sebagai fasilitator pengembangan kelompok tani?

Identitas Responden (Informan Utama)

Nama :

Jabatan :

Jenis kelamin :

Pekerjaan :

Regulator dalam penelitian ini adalah peran pemerintah desa sebagai pihak yang membuat, menetapkan, menerapkan, dan mengawasi kebijakan serta aturan desa yang terkait dengan pemberdayaan kelompok tani. Peran pemerintah desa adalah memberi arah, pedoman, dan kepastian hukum agar kegiatan kelompok tani berjalan dengan tertib, terencana, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu sebagai PPL tentang kebijakan atau peraturan desa yang mengatur pemberdayaan kelompok tani di Desa Pardamean Sibisa?
2. Apakah kebijakan desa tersebut telah menjadi pedoman yang jelas dan terarah dalam pelaksanaan kegiatan kelompok tani di lapangan?
3. Seberapa besar peran petugas penyuluh pertanian (PPL) dan pemerintah desa dalam penyusunan atau pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan sektor pertanian serta kelompok tani?

Dinamisor dalam penelitian ini adalah peran pemerintah desa sebagai motor penggerak dan penjamin partisipasi masyarakat, terutama kelompok tani, dalam proses pemberdayaan. Peran dinamisor adalah menggerakkan pemerintah desa untuk membangkitkan semangat, kesadaran, dan niat petani untuk ikut serta dalam kegiatan kelompok tani, penyuluhan, dan pelatihan pertanian.

1. Seberapa jauh kegiatan penyuluhan pertanian yang telah Bapak/Ibu lakukan kepada kelompok tani di desa ini?
2. Jenis-jenis pelatihan atau bimbingan yang telah diberikan kepada kelompok tani, serta seberapa sering kegiatan tersebut dilakukan.
3. Bagaimana cara Bapak/Ibu menjalankan kunjungan lapangan untuk mendukung kegiatan kelompok tani?
4. Menurut Bapak/Ibu, apakah kegiatan penyuluhan dan pelatihan yang telah dilaksanakan berhasil meningkatkan pemahaman dan keterlibatan para petani? Jelaskan.

Fasilitator dalam penelitian ini adalah pemerintah desa, yang bertindak sebagai pihak yang menyalurkan dan menghubungkan kebutuhan kelompok tani dalam upaya pemberdayaan. Peran fasilitator adalah menjadikan pemerintah desa sebagai penyedia sarana dan prasarana pertanian, bantuan, pelatihan, penyuluhan, serta bantuan teknis. Fasilitator juga membantu menjalin kerja sama dengan instansi terkait seperti dinas pertanian dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

1. Peran pemerintah desa dalam memberikan fasilitas dan infrastruktur pertanian bagi kelompok tani yang berkelanjutan adalah sangat penting.
2. Apakah bantuan yang diberikan oleh pemerintah desa seperti bibit, pupuk, alat pertanian, dan pelatihan sudah sesuai dengan kebutuhan para petani di lapangan?
3. Seberapa jauh pemerintah desa dalam mendukung kerja sama antara kelompok tani dengan instansi lain, seperti dinas pertanian atau lembaga terkait?

4. Bagaimana mekanisme kerja sama antara pemerintah desa dan pengurus PPL dalam proses penyaluran bantuan serta pelaksanaan pendampingan?
5. Menurut Bapak/Ibu, apa saja hal-hal yang perlu ditingkatkan agar peran pemerintah desa sebagai fasilitator dapat berjalan secara lebih optimal?



Identitas Responden (Informan Tambahan)

Nama :

Jabatan :

Jenis kelamin :

Pekerjaan :

Regulator dalam penelitian ini adalah peran pemerintah desa sebagai pihak yang membuat, menetapkan, menerapkan, dan mengawasi kebijakan serta aturan desa yang terkait dengan pemberdayaan kelompok tani. Peran pemerintah desa adalah memberi arah, pedoman, dan kepastian hukum agar kegiatan kelompok tani berjalan dengan tertib, terencana, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1. Apakah Anda mengetahui adanya peraturan atau kebijakan yang berlaku di desa terkait kelompok tani?
2. Bagaimana pandangan Anda mengenai kebijakan yang diambil pemerintah desa dalam memberikan dukungan kepada kelompok tani?
3. Apakah kebijakan tersebut dirasakan adil dan memberikan manfaat bagi kelompok tani?
4. Apakah kelompok tani pernah terlibat dalam penyusunan kebijakan desa?

Dinamisator dalam penelitian ini adalah peran pemerintah desa sebagai motor penggerak dan penjamin partisipasi masyarakat, terutama kelompok tani, dalam proses pemberdayaan. Peran dinamisator adalah menggerakkan pemerintah desa untuk membangkitkan semangat, kesadaran, dan niat petani untuk ikut serta dalam kegiatan kelompok tani, penyuluhan, dan pelatihan pertanian.

1. Bagaimana bentuk pembinaan dan pendampingan yang dilakukan terhadap kelompok tani?
2. Seberapa besar peran pemerintah desa dan PPL dalam mendorong partisipasi aktif para anggota kelompok tani?
3. Peran pemerintah desa dalam meningkatkan semangat dan kesadaran para petani untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelompok.
4. Apakah kegiatan penyuluhan dan pelatihan pertanian dilaksanakan secara teratur?

Fasilitator dalam penelitian ini adalah pemerintah desa, yang bertindak sebagai pihak yang menyalurkan dan menghubungkan kebutuhan kelompok tani dalam upaya pemberdayaan. Peran fasilitator adalah menjadikan pemerintah desa sebagai penyedia sarana dan prasarana pertanian, bantuan, pelatihan, penyuluhan, serta bantuan teknis. Fasilitator juga membantu menjalin kerja sama dengan instansi terkait seperti dinas pertanian dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

1. Bantuan apa saja yang telah diterima oleh kelompok tani dari pemerintah desa?
2. Apakah bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan petani di lapangan?
3. Bagaimana proses penyaluran bantuan yang Anda rasakan?
4. Apakah pemerintah desa memberikan fasilitas berupa pelatihan, penyuluhan, atau pendampingan dalam bidang pertanian yang berkelanjutan?
5. Menurut pendapat Anda, apa saja aspek yang masih perlu diperbaiki dalam peran pemerintah desa dalam mendukung kelompok tani?

Lampiran V Dokumentasi Observasi



Gambar 8. Kantor Kepala Desa Pardamean Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba



Gambar 9. Lokasi Ladang Milik Petani



Gambar 10. Tanaman Cabai Petani



Gambar 11. Lokasi Jalan Menuju Ladang Petani



Gambar 12. Lokasi Jalan Menuju Ladang Petani



Gambar 13. Serangan Hama Pada Tanaman Jagung

Lampiran VI Dokumentasi Wawancara



Gambar 14. Wawancara Dengan Kepala Desa Pardamean Sibisa



Gambar 15. Wawancara Dengan Sekretaris Desa Pardamean Sibisa



Gambar 16. Wawancara Dengan Koordinator PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan)



Gambar 17. Wawancara Dengan Ketua Kelompok Tani Lestari



Gambar 18. Wawancara Dengan Anggota Kelompok Tani Lestari